



2025


Laporan Tahunan



RIGHTS +
RESOURCES

Daftar Isi

Pesan dari Presiden Kami	3
Cara Kerja RRI	4
Wilayah Kerja Kami	5
Ringkasan Hasil Kerja	6
Hasil Tahun 2025	8
Memperkuat Kepemimpinan Pemegang Hak yang Inklusif dan Kekuatan Kolektif	9
Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan	15
Mendorong Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat	22
Bukti, Akuntabilitas, dan Kepemimpinan Pemikiran	30
Publikasi Terpilih	33
Pembelajaran dari Kegiatan Kami	36
Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pengelolaan	37
Laporan Keuangan 2025	38



Seorang pria Maasai adat
mengenakan pakaian
tradisional di Kenya.
Foto: Asha Stuart
RRI, 2025



Pesan dari Presiden Kami

Solange Bandiaky-Badji

Tahun 2025 merupakan tahun pembaruan dan refleksi bagi koalisi kami. Meskipun terjadi gejolak politik yang meluas dan gangguan pada pendanaan pembangunan global, tahun ini memberi kami momentum dan semangat baru untuk memperkuat posisi kami sebagai jaringan solidaritas global yang mewujudkan kemajuan penting dan strategis bagi hak serta pembangunan Masyarakat Adat (MA), Komunitas Lokal (KL), dan Masyarakat Keturunan Afrika (MKA) di seluruh dunia.

Kami memulai tahun 2025 dengan merayakan peringatan 20 tahun berdirinya RRI. Ini adalah momen penting bagi kami untuk meninjau kembali pencapaian dan tantangan bersama kami selama dua dekade terakhir serta meninjau kembali posisi kami dalam realitas global baru di sektor ini. Sepanjang tahun 2025, kami telah melakukan diskusi-diskusi mendalam dengan para pendiri RRI, para pendukung awal, para tetua masyarakat adat, pemimpin perempuan, kaum muda, serta sekutu global kami untuk memetakan perjalanan koalisi selama 20 tahun terakhir. Kami juga mengadakan tinjauan independen terhadap kemajuan RRI dalam mencapai tujuan Program Strategis lima tahunannya saat ini, yang akan berakhir pada tahun 2027.

Semua evaluasi ini menegaskan posisi unik RRI dalam ekosistemnya sebagai satu-satunya koalisi yang menyatukan beragam gerakan dinamis yang dipimpin oleh MA, KL, dan MKA serta perempuan dan pemuda untuk memanfaatkan kekuatan aksi kolektif dalam memperjuangkan hak-hak dan otonomi mereka. Hal ini menunjukkan luasnya pengalaman kami dalam mendorong penguatan gerakan berbasis kepemimpinan pemegang hak, serta kapasitas kami dalam menghasilkan analisis strategis yang tepat waktu untuk mendukung perubahan kebijakan dan pergeseran paradigma besar. Tak kalah pentingnya, ini juga menegaskan kepemimpinan pemikiran yang kuat dan kemampuan kami untuk menjalin kemitraan dengan sekutu yang tidak terduga.

Yang terpenting, ini telah meletakkan landasan bagi restrukturisasi radikal koalisi kami. Restrukturisasi ini, yang mulai berlaku pada awal 2026, menambahkan banyak organisasi pemegang hak nasional baru ke dalam kelompok mitra inti kami, membentuk Dewan Penasihat dan Dewan Tetua, memperjelas tata kelola koalisi serta proses penerimaan anggota, serta menambah perwakilan pemuda, masyarakat keturunan Afrika, serta masyarakat adat dari Amerika Utara ke dalam Dewan Direksi kami. Semua perubahan ini semakin memperkuat posisi kami sebagai jaringan solidaritas yang dipimpin oleh MA, MKA, dan KL dengan nilai tambah yang unik di sektor ini.

Dalam konteks ini, koalisi RRI berupaya sepanjang tahun untuk mendorong komitmen pendanaan global baru di COP30, menyalurkan pendanaan langsung kepada masyarakat melalui mekanisme pendanaan yang dipimpin oleh pemegang hak, CLARIFI, serta memperjuangkan pengakuan hukum atas hak tanah dan sumber daya milik pemegang hak. Kami memfasilitasi jaringan global pertama bagi para aktivis pemuda dari kelompok MA, MKA, dan KL, mengangkat suara dan kepemimpinan para pemimpin perempuan, memperkuat pemantauan masyarakat terhadap investasi berbasis lahan dan rantai pasokan, serta memajukan inisiatif konservasi berbasis hak guna mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Laporan Tahunan ini menguraikan beberapa contoh dampak yang dipimpin oleh anggota koalisi kami pada tahun 2025.

Saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra, donatur, dan sekutu kami atas dukungan berkelanjutan yang telah mendorong keberhasilan kami serta menguatkan langkah kami untuk terus maju.

Dalam solidaritas,

Dr. Solange Bandiaky-Badji
Koordinator dan Presiden, RRI



Cara Kerja RRI

RRI mendukung hak kepemilikan bersama dan hak mata pencaharian Masyarakat Adat (MA), Masyarakat Keturunan Afrika (MKA), dan Komunitas Lokal (KL) dengan mendorong komitmen dan tindakan global yang lebih besar terhadap reformasi kebijakan, pasar, dan hukum yang menjamin hak mereka untuk memiliki, mengelola, dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam, terutama tanah dan hutan. Untuk mewujudkan misi ini, RRI berkontribusi pada tiga tujuan global:

Meningkatkan luas lahan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat secara signifikan, dengan jaminan hak untuk mengelola, melestarikan, memanfaatkan, serta memperdagangkan produk dan jasa.

Meningkatkan penerapan undang-undang, peraturan, dan praktik progresif yang mendukung hak kepemilikan tanah adat dan hukum bagi MA, MKA, dan KL terutama perempuan dan kaum muda.

Meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi MA, MKA, dan KL secara signifikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh mereka sendiri.

Kami mewujudkan misi ini dengan melaksanakan berbagai hal berikut:

1



Mengumpulkan bukti dan menyajikan analisis strategis untuk memantau hak atas tanah serta menganalisis hubungan antara hak yang terjamin dengan hasil positif dalam bidang iklim dan pembangunan berkelanjutan.

2

Menggalang jaringan, mendorong dialog, serta meningkatkan rasa saling memahami dan menghormati di antara para pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pemegang hak, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara luas; serta menciptakan ruang untuk berbagi pelajaran dan bersama-sama merumuskan tujuan advokasi bersama.

3



Memperkuat kapasitas organisasi, jaringan, dan koalisi MA, MKA, dan KL untuk berbagi pengalaman, mengembangkan, dan memajukan posisi advokasi bersama di forum lokal, nasional, regional, dan global.

4

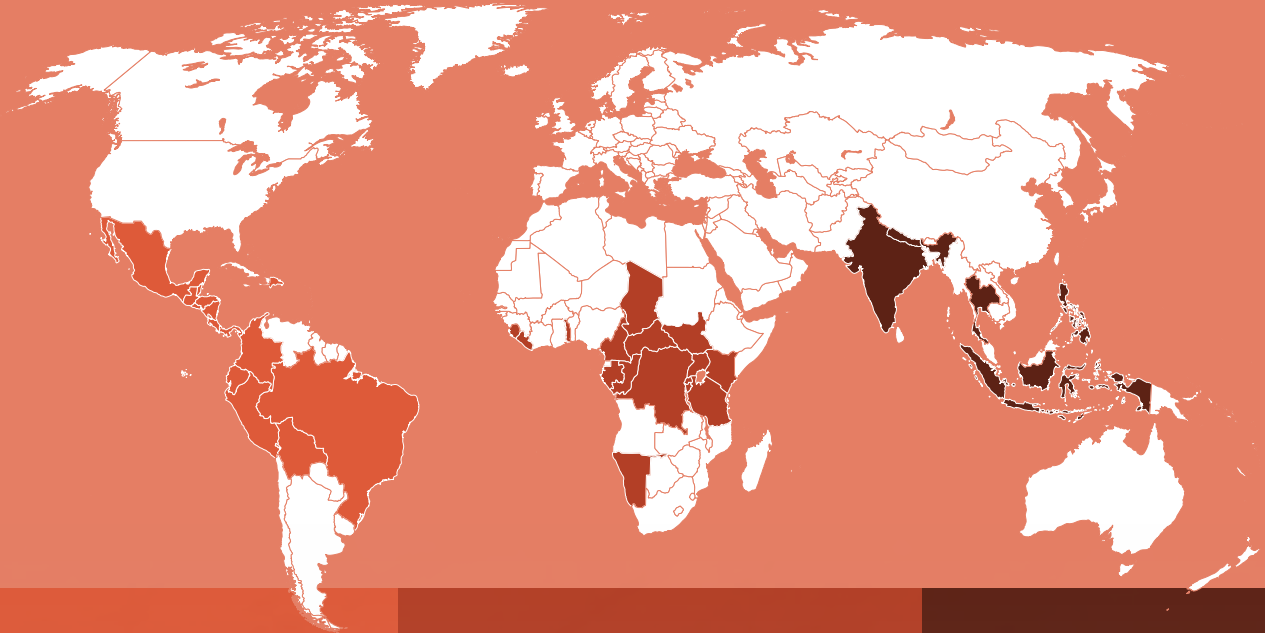
Memperluas dan meningkatkan pendanaan langsung kepada pemegang hak, dengan fokus khusus pada perempuan, sambil mendukung mereka dalam upaya mereka untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan organisasi multilateral atas komitmen pendanaan global.



Gayanimaya Tamang, anggota Kelompok Pengguna Hutan Komunitas Lag Lage Pacha di dekat Kathmandu, memupuk tanah.
Foto: Asha Stuart
RRI, 2025

Wilayah Kerja Kami

Proyek di 31 negara



Amerika Latin

Bolivia
Brasil
Kolombia
Kosta Rika
Republik Dominika
Ekuador
Guatemala
Honduras
Meksiko
Panama
Peru



Afrika

Burundi
Kamerun
Republik Afrika Tengah
Cad
Republik Demokratik Kongo
Gabon
Kenya
Liberia
Namibia
Republik Kongo
Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Togo
Uganda



Asia

India
Indonesia
Nepal
Filipina
Tailan



Para perempuan berkumpul untuk menyiapkan makanan di luar Tebat Pulau, Sumatra, Indonesia.
Foto: Jacob Maentz
RRI, 2022

Ringkasan Hasil Kerja

RRI memberikan dukungan finansial, solidaritas, analisis teknis dan strategis, serta sponsor fiskal kepada para mitra dan sekutunya di negara-negara Global Selatan.*



1.017.390

hektar lahan telah memiliki sertifikat kepemilikan atas nama MA, KL, dan MKA



~200.000

hektar permohonan sertifikat kepemilikan atas lahan yang disusun oleh MA, KL, dan MKA telah diajukan kepada pemerintah



30.000.000 +

hektar lahan telah dipetakan oleh MA, KL, dan MKA melalui proses partisipatif berbasis komunitas



209

konflik lahan telah dimediasi atau diselesaikan pada lahan kolektif milik MA, KL, atau MKA



100 +

analisis kebijakan dan rekomendasi telah dikembangkan oleh mitra dan kolaborator untuk mendukung proses tata kelola dan reformasi lahan dan hutan nasional



80 +

mekanisme pemantauan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif telah diterapkan



40.000 +

anggota MA dan KL telah dilatih dalam hak kepemilikan, tata kelola lahan, advokasi, dan kepemimpinan masyarakat

***Catatan:** Data masa jabatan yang dilaporkan di sini mencakup periode 2022–2025.

Ini merupakan indikator dampak untuk RRI dalam kerangka Program Strategis IV kami. Oleh karena itu, kami mengumpulkan data dan menyusun laporan berdasarkan rentang waktu serta kontribusi yang diharapkan terhadap dampak dari kerangka kerja tersebut.



Tampilan udara Sungai Potaro di Guyana, Amerika Selatan.
Foto: iStock

Pada tahun 2025, mekanisme pendanaan CLARIFI yang dipimpin oleh pemegang hak cipta RRI telah berkontribusi pada:

81 proyek aktif yang mendukung 71 mitra di 20 negara, termasuk 23 organisasi yang dipimpin oleh perempuan, dengan menggalang lebih dari \$10 juta dalam bentuk dukungan langsung.

Lebih dari 50% proyek tersebut berupaya memperkuat hak kepemilikan tanah secara kolektif, sementara proyek lainnya berfokus pada peningkatan konservasi, keadilan gender, dan dukungan terhadap perekonomian lokal.

\$1,8 miliar komitmen dana yang dijanjikan di COP30 untuk isu hutan dan penguasaan tanah, yang merupakan hasil dari tindakan kolektif dan terkoordinasi dari koalisi RRI dan sekutunya.

Seorang pria Maasai di peternakan Maji Moto, Kenya, menunjukkan sertifikat hak atas tanah komunitasnya.
Foto: TonyWild Photography RRI, 2023



2025 Hasil Tahun

Sekolah Adat Komunitas
Maria di Indonesia.
Foto: Rachel Watson
Campaign for Nature, RRI,
dan CLARIFI, 2024



Memperkuat Kepemimpinan Pemegang Hak yang Inklusif dan Kekuatan Kolektif

Kepemimpinan Pemuda Global

Pada bulan Juli 2025, RRI menyelenggarakan *Global Youth Forum* atau Forum pemuda Global pertama di Bali, Indonesia, bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Pertemuan bersejarah ini mempertemukan 55 pemimpin pemuda dari MA, MKA, dan KL dari 22 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Para peserta membangun solidaritas lintas wilayah dan bersama-sama menyusun *Global Youth Roadmap* untuk aksi dan keterlibatan secara kolektif. Peta jalan tersebut menetapkan lima prioritas bersama untuk partisipasi pemuda dan pengembangan kepemimpinan, yang memposisikan pemuda sebagai pengambil keputusan dalam koalisi RRI, bukan sekadar sebagai penerima manfaat.

Di saat yang bersamaan, para pemuda dalam koalisi tersebut meluncurkan RRI *Global Youth Network*, yang menghubungkan gerakan pemuda regional dalam satu platform global terpadu. Sebuah studi pendahuluan terhadap 113 organisasi pemuda sedunia menegaskan bahwa **Global Youth Network RRI mengisi kekosongan penting: belum adanya platform yang secara signifikan mempertemukan kaum muda dari kelompok MA, MKA, dan KL, serta kelompok-kelompok yang bekerjasama dalam bidang keamanan kepemilikan lahan, keadilan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati.**



“Global Youth Network RRI ini lebih dari sekadar aliansi; ini adalah harapan yang nyata. Jaringan ini berakar pada budaya kita dan tekad untuk memperjuangkan keadilan di tengah krisis iklim, di mana pemuda-pemudi dari masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal menjadi pelaku utama, bukan sekadar saksi perubahan. Inilah saatnya suara kita didengar.”

Alejandra Palacios

Pemimpin Pemuda Keturunan Afrika, Ekuador

Mengingat mandat RRI untuk terus memberikan kontribusi strategis dan memastikan sinergi di dalam sektor ini, RRI kemudian memfasilitasi para peserta Global Youth Forum dalam menyusun *Pernyataan Keadilan Iklim Pemuda-Pemudi untuk COP30 di Brasil*, yang menandai langkah terkoordinasi mereka dalam advokasi iklim internasional. RRI secara resmi meluncurkan *Pernyataan* ini bersama dengan Global Youth Network dan Roadmap di COP30 guna memaksimalkan jangkauan globalnya.

Secara bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini meletakkan landasan bagi kepemimpinan dan partisipasi pemuda-pemudi yang berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan global pada tahun 2026 dan seterusnya.



Para peserta pemuda berpose untuk foto pada Forum Pemuda Global pertama RRI. Foto: Matata RRI dan AMAN, 2025

Memperkuat Kepemimpinan Pemegang Hak yang Inklusif dan Kekuatan Kolektif

Kekuatan Kolektif Perempuan

Pada tahun 2025, Women in Global South Alliance (WiGSA) atau Aliansi Perempuan di Belahan Selatan Global memperkuat posisinya di kancah global sebagai jaringan solidaritas perempuan lintas benua yang unik, yang memperjuangkan hak kepemilikan tanah bagi perempuan di wilayah MA, MKA, dan KL serta akses langsung terhadap pembiayaan. WiGSA menerima jumlah permohonan keanggotaan yang memecahkan rekor dan berkembang menjadi 28 organisasi anggota yang beroperasi di lebih dari 60 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Para anggota Women in Global South Alliance (WiGSA) berbicara dalam sebuah panel pada Pekan Aksi Iklim London.
Foto: RRI, 2025



Pada tahun 2025, para anggota WiGSA bersama-sama meletakkan nilai-nilai dasar yang berlandaskan persatuan, inklusi, saling menghormati, kesetaraan, suara dan perwakilan yang setara, solidaritas, transparansi dan akuntabilitas, serta komunikasi antarbudaya. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan cara anggota bekerja secara kolaboratif untuk secara sistematis mengurangi kesenjangan gender, sekaligus mencerminkan proses kolektif unik yang dibangun atas dasar kepercayaan dan penyatuan berbagai pengalaman perempuan menjadi prioritas bersama.

RRI dan WiGSA menghasilkan analisis baru yang penting untuk memperkuat advokasi perempuan, termasuk laporan berjudul *Is Global Funding Reaching Indigenous, Afro-descendant, and Local Community Women?* (Apakah Pendanaan Global Menjangkau Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, dan Komunitas Lokal?) Studi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan utama para donor mengenai prioritas perempuan dan hambatan dalam memperoleh pendanaan langsung. Para donor menggambarkan laporan tersebut sebagai “sumber daya yang bermanfaat dan tepat waktu” untuk menginformasikan mekanisme pendanaan di masa depan, dan laporan ini ditampilkan dalam publikasi oleh Forest Tenure Funders Group, FAO, Land Climate Review, serta laporan *FTFG 2025*.

Analisis tersebut juga berperan dalam mendorong Forest Tenure Funders Group untuk mengakui dan berkomitmen mengatasi kesenjangan gender dalam pendanaan bagi perempuan melalui janji pendanaan baru senilai \$1,8 miliar yang diumumkan di COP30, serta menjadi landasan utama kampanye *The Pledge We Want* (Janji yang Kami Inginkan) yang digagas oleh RRI.

WiGSA juga mengangkat peran kepemimpinan perempuan dalam berbagai pertemuan global, termasuk CSW69, Pekan Aksi Iklim London, Pekan Iklim PBB di New York, COP30, UNEA-7 di Kenya, serta lokakarya kebijakan Women Land Rights Initiative mendorong tata kelola pembiayaan global yang lebih inklusif untuk hak atas tanah perempuan dalam kerangka tiga Konvensi Rio. Keterlibatan ini memperkuat visibilitas perempuan dalam perdebatan seputar iklim, konservasi, dan pendanaan.

Melalui CLARIFI, 4 organisasi WiGSA menerima pendanaan langsung, dan 7 organisasi lainnya mendapat dukungan secara tidak langsung melalui program-program regional di Andes Tropis dan Cekungan Kongo. Sejak saat itu, CLARIFI telah menyusun serangkaian proyek WiGSA untuk siklus pendanaan mendatang guna memperluas akses langsung ke pembiayaan bagi organisasi perempuan di tingkat komunitas.

“Temuan-temuan tersebut menyoroti tantangan yang terus berlanjut dalam memajukan kepemimpinan perempuan dan memastikan keterlibatan bermakna mereka dalam pengambilan keputusan. Kendala struktural ini memaksa banyak organisasi perempuan untuk bergantung pada tenaga sukarela, yang memperkuat pola kerja tanpa upah dan melemahkan keberlanjutan kelembagaan. Ketidaksetaraan ini sangat mencolok bagi organisasi perempuan keturunan Afrika, yang beroperasi dengan anggaran kurang dari setengah anggaran organisasi sejenis yang dipimpin oleh masyarakat adat, mencerminkan ekosistem donor yang masih buta terhadap rasisme struktural. Pendanaan jangka panjang dan pendekatan interseksional yang memprioritaskan kebutuhan organisasi perempuan sangatlah penting untuk mengatasi ketidaksetaraan yang terus berlanjut ini.”

Tinjauan Kelompok Pendana Pengelolaan Hutan terhadap laporan berjudul *Is Global Funding Reaching Indigenous, Afro-descendant, and Local Community Women?*

Pada tahun 2020, banyak penduduk masyarakat adat Chepang diusir secara paksa dari tepi Sungai Kusum Khola di Chitwan, Nepal, dan 60 keluarga dipindahkan ke sepanjang Sungai Parabi Khola tanpa kepastian hak atas tanah maupun layanan dasar. Pada tahun 2024, National Indigenous Women's Federation (NIWF) atau Federasi Perempuan Adat Nasional Nepal, dengan dukungan keuangan dari RRI pada tahun 2024–2025, bekerja sama dengan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui pengumpulan data, pelatihan, pengorganisasian masyarakat, dan dialog dengan pemerintah. Sebuah demonstrasi damai di Kathmandu yang diikuti oleh 220 peserta juga menarik perhatian nasional. Sebagai hasilnya, pemerintah memasang fasilitas air minum dan listrik, melakukan survei lahan untuk 60 rumah tangga, dan mulai membangun perumahan permanen. Pemerintah Provinsi Bagmati juga telah mulai merencanakan pemukiman percontohan bersama para profesor dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik, sementara Komite Perjuangan Perempuan Chepang yang terdiri dari 15 perempuan kini memperkuat kepemimpinan dan advokasi masyarakat.

Memperkuat Kepemimpinan Pemegang Hak yang Inklusif dan Kekuatan Kolektif

Pembentukan Koalisi

Acara peringatan 20 tahun RRI di Kathmandu, Nepal, mempertemukan lebih dari 240 pemegang hak, mitra, pendiri, dan pembuat keputusan dari lebih dari 40. Tujuh mitra lokal (Federation of Community Forestry Users Nepal; Nepal Federation of Indigenous Nationalities; Green Foundation Nepal; Center for Indigenous Peoples' Research and Development; Nepal Indigenous Women's Federation; Indigenous Women Legal Awareness Group; Women Rights and Resource Network) bekerja sama melaksanakan program empat hari yang menggabungkan panel tingkat tinggi, diskusi tematik, dan sesi strategi koalisi.



Seorang penampil tertangkap kamera selama upacara pembukaan perayaan ulang tahun ke-20 RRI di Kathmandu, Nepal. Foto: Sandesh Chaudhury RRI, 2025

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka [perayaan pencapaian-pencapaian sebelumnya](#) sekaligus bersama-sama merumuskan visi bersama untuk masa depan hak teritorial. Para peserta menyerukan pentingnya lokalisasi yang lebih kuat, fokus yang lebih besar pada mata pencaharian dan perekonomian masyarakat, penelitian yang dipimpin secara lokal, serta konservasi berbasis masyarakat dan di saat yang sama memajukan kolaborasi Utara-Selatan-Selatan. Koalisi ini menegaskan kembali komitmennya terhadap kepemimpinan pemuda dan perempuan serta sepakat untuk memperluas keanggotaannya dengan menyambut mitra dan tokoh-tokoh senior baru, khususnya untuk mengatasi kurangnya keterwakilan pemuda, organisasi pastoral, dan perwakilan masyarakat keturunan Afrika dalam tata kelola koalisi.

Mandat untuk memperluas keanggotaan ini merupakan hasil utama dari acara tersebut, yang diwujudkan melalui [perubahan bersejarah](#) dalam struktur dan tata kelola koalisi yang untuk pertama kalinya memasukkan perwakilan masyarakat keturunan Afrika dan pemuda ke dalam Dewan Direksi RRI, serta anggota suku dan Penduduk Asli Amerika Utara.

“Collective Action Award RRI menunjukkan kepada kita bahwa ketika masyarakat bahu-membahu, hal-hal luar biasa dapat terwujud.”

Nelson Ole Reiyia

CEO dan salah satu Pendiri Nashulai Maasai Conservancy, Kenya

Dalam perayaan di Kathmandu, RRI memberikan penghargaan Collective Action Award perdana kepada tiga komunitas, yang dipilih dari lebih dari 190 nominasi dan daftar panjang yang berisi 18 finalis.

Silakan klik nama masing-masing komunitas untuk menonton video singkat tentang kegiatan mereka.

- Kenya: [Nashulai Maasai Conservancy](#)
- Indonesia: [Gerakan Kepulauan Aru](#)
- Brazil: [Jupago Kreka Collective](#)

RRI memberikan penghargaan kepada komunitas-komunitas ini atas pencapaian mereka dalam bidang hak teritorial dan kebangkitan budaya. Penghargaan ini menegaskan bahwa perubahan yang berkelanjutan didorong oleh aksi kolektif, gerakan kolektif yang berkelanjutan, dan kepemimpinan lintas generasi.

Perayaan ulang tahun ke-20 RRI juga meningkatkan visibilitas gerakan akar rumput melalui liputan media internasional dan menjadi ajang pemutaran perdana global sebuah film [dokumenter](#) yang merayakan 20 tahun aksi kolektif RRI, sekaligus memperkuat identitas RRI sebagai jaringan solidaritas global yang berlandaskan pada kepemimpinan komunitas.

Pada tahun 2025, RRI melanjutkan dukungan jangka panjangnya terhadap koalisi Masyarakat Keturunan Afrika di Amerika Latin dan Karibia. Pada tahun yang sama, koalisi tersebut secara resmi mengadopsi nama baru, yaitu *International Coalition of Territories and Afro-descendant Peoples in Latin America and the Caribbean* (CITAFRO), atau dalam bahasa Indonesia, Koalisi Internasional Wilayah dan Masyarakat Keturunan Afrika di Amerika Latin dan Karibia.

Peluncuran CITAFRO ini merupakan hasil dari integrasi regional selama bertahun-tahun, penentuan prioritas strategis masyarakat keturunan Afrika, serta advokasi berbasis bukti dengan dukungan RRI untuk meningkatkan keterwakilan masyarakat keturunan Afrika di ruang-ruang pengambilan keputusan internasional yang penting. Pada bulan April, CITAFRO dan RRI meluncurkan [Deklarasi Brasília](#), yang menyoroti kontribusi ekonomi, politik, dan sosial-lingkungan dari komunitas masyarakat keturunan Afrika sekaligus membahas dampak parah krisis iklim terhadap wilayah mereka.

Di COP30, CITAFRO dan RRI meluncurkan [Atlas Komunitas Keturunan Afrika di Wilayah Maritim Karibia yang Lebih Luas](#) untuk menunjukkan interaksi antara MKA dengan ekosistem laut dan pesisir yang sangat penting bagi agenda konservasi global dan yang terancam oleh perubahan iklim. Pada acara ini, **advokasi strategis CITAFRO berkontribusi pada pengadopsian bahasa yang merujuk pada Orang Keturunan Afrika dalam dokumen resmi UNFCCC, sebuah terobosan bersejarah pertama dalam 30 tahun terakhir. Penggunaan bahasa ini mengakui MKA sebagai kelompok yang terdampak secara tidak proporsional oleh perubahan iklim dan sebagai kontributor penting dalam mitigasi perubahan iklim.**

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Reformasi Kebijakan Nasional di Republik Demokratik Kongo

Sebagai negara yang mencakup 60 persen wilayah Cekungan Kongo, penyerap karbon terbesar di dunia, Republik Demokratik Kongo (RDK) telah lama menghadapi konflik dan deforestasi yang terkait dengan ketiadaan kerangka kerja penggunaan lahan yang jelas. Pada bulan Juli 2025, Presiden RDK menandatangani Undang-Undang Perencanaan Penggunaan Lahan pertama dalam sejarah negara tersebut, yang menandai langkah bersejarah menuju tata kelola lahan yang inklusif dan berbasis hak.



Perempuan Pygmy adat mengumpulkan air di Republik Demokratik Kongo (DRC). Foto: EnviroNews RDC RRI, 2024

Undang-undang ini, yang pertama kali disahkan oleh Parlemen pada tahun 2023, terbentuk berkat advokasi berkelanjutan jangka panjang dari koalisi masyarakat sipil yang luas dengan dukungan finansial dan teknis dari RRI, termasuk Pusat Teknologi Inovatif dan Pembangunan Berkelanjutan (CTIDD); Koalisi Pemimpin Perempuan untuk Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (CFLEDD); Congolese Resources Institute (CRI); Pusat Dukungan Pengelolaan Hutan Tropis yang Berkelanjutan (CAGDFT); Congo-Watch; dan Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA).

Ketentuan utama dalam undang-undang ini mencakup pengakuan eksplisit atas hak tanah adat; kewajiban memperoleh persetujuan masyarakat setempat untuk setiap proyek penggunaan lahan; mekanisme penyelesaian konflik; serta perlindungan lingkungan bagi lahan basah, lahan gambut, dan ekosistem sensitif lainnya. Persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas, tanpa paksaan, berdasarkan informasi yang memadai, dan diperoleh sebelum kegiatan dimulai. Tak kalah penting, undang-undang ini menyelaraskan tata kelola lahan dengan tujuan iklim dan pembangunan, sekaligus memperkuat jaminan kepemilikan lahan bagi masyarakat.

Penerapan yang efektif dari undang-undang pertanahan nasional yang telah direvisi akan membutuhkan tindakan terkoordinasi dari pemerintah, mobilisasi sumber daya, pemantauan, serta keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini merupakan langkah penting ke depan dalam upaya menjamin hak atas tanah adat secara penuh. RRI dan para mitranya di kawasan ini tetap berkomitmen untuk mendukung penerapan kemenangan hukum yang telah diperjuangkan dengan susah payah ini serta reformasi kebijakan yang berkelanjutan.

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Menghentikan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara yang Kontroversial di Kenya

Di Kenya, RRI mendukung kampanye perlawanan yang dipimpin masyarakat dan melalui gerakan deCOALonize untuk menghentikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Lamu serta eksplorasi batu bara baru di Kitui. **RRI memfasilitasi lebih dari 225 anggota masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, agar dapat mengakses dukungan dan perangkat yang diperlukan untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek batu bara yang merugikan. Upaya ini berkontribusi pada kemenangan bersejarah di pengadilan, yang memperkuat putusan Pengadilan Lingkungan Nasional untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tersebut.** RRI bekerja sama dengan Centre for Human Rights and Civic Education (CHRCE) dan inisiatif Save Lamu untuk mempromosikan kampanye ini melalui forum lingkungan, pemutaran film, sosialisasi media, dan **kampanye media sosial #NowOrNever** yang populer.



Seorang demonstran memprotes pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 1.050 MW di Lamu, Kenya.
Foto: Save Lamu, 2025

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Memperkuat Tata Kelola Pertanahan di Afrika Sub-Sahara

Pada Konferensi African Land Institutions Network for Community Rights (ALIN) atau Jaringan Lembaga Pertanahan Afrika untuk Hak-Hak Masyarakat ke-5 pada bulan Oktober 2025, RRI bekerja sama dengan Kementerian Pertanahan, Perumahan, dan Perencanaan Pembangunan Siera Leoni serta Aliansi Pertanahan Siera Leoni untuk mengumpulkan perwakilan pemerintah dari lebih dari 16 negara Afrika, bersama dengan para mitra dan sekutu. RRI dan para mitranya **berperan utama** dalam melibatkan para peserta untuk berbagi pengalaman mengenai reformasi agraria, tata kelola pertanahan yang bertanggung jawab, serta penegakan hak-hak atas tanah masyarakat. Konferensi ini memperkuat upaya pemantauan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan memperkuat seruan global untuk bertindak atas tanah masyarakat adat dan komunitas lokal. Acara ini ditutup dengan penandatanganan **Deklarasi Freetown** yang mempromosikan reformasi tata kelola tanah yang inklusif, desentralisasi, dan didanai dengan baik.



Para penyelenggara acara dan pejabat pemerintah berpose untuk foto di atas panggung pada Konferensi ke-5 African Land Institutions Network for Community Rights (ALIN).
Foto: RRI, 2025

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Menetapkan Preseden di Bolivia dan Seluruh Wilayah Amerika Latin

Pengadilan Agraria dan Lingkungan Hidup Bolivia menerima gugatan tersebut dan menetapkan serangkaian tindakan pencegahan untuk melindungi Sungai Madre de Dios serta masyarakat di Wilayah Multietnis II (TIM II). Keputusan ini merupakan respons atas Gugatan Lingkungan Hidup Preventif yang diajukan terhadap Otoritas Yurisdiksi Administrasi Pertambangan (AJAM) dan koperasi pertambangan emas ASOBAL.

Gugatan tersebut menuntut penangguhan kegiatan pertambangan ilegal, larangan penerbitan izin pertambangan baru, dan pengakuan Sungai Madre de Dios sebagai subjek hak kolektif. Tindakan pencegahan ini menetapkan preseden penting di Bolivia dan di seluruh Amerika Latin, yang tidak hanya mengakui hak masyarakat adat yang tinggal di TIM II, tetapi juga hak alam.



Matahari terbenam di atas Sungai Madre de Dios.
Foto: Shutterstock

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Ekuador

Di Ekuador, dukungan advokasi dan pendanaan dari **Mekanisme Tanggapan Strategis RRI** memungkinkan **Suku Asli A'i Kofan**, melalui organisasi **NOA'IKE**, untuk memperoleh hak atas pelestarian, pengelolaan, dan administrasi 20.000 hektar wilayah leluhur di dalam **Cagar Alam Produksi Satwa Liar Cuyabeno**. Perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Transisi Ekologis telah menetapkan pengakuan ini dan menjadi preseden nasional bagi konservasi berbasis hak di dalam kawasan lindung.

Kesepakatan tersebut membantu membentuk sebuah komunitas baru, **Thesi T'sampi** ("Tanah Jaguar"), yang menyediakan lingkungan hidup yang lebih aman sekaligus memperkuat tata kelola masyarakat adat di dalam kawasan cagar alam. Proyek ini menunjukkan bagaimana kerangka kerja konservasi dapat mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak teritorial masyarakat adat sekaligus melindungi kebebasan kedua komunitas dan lingkungan.



Aksi demonstrasi menentang perusahaan Rainforest Ecuador oleh komunitas Selva Alegre, Ekuador. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut memperoleh sertifikat kepemilikan yang bersifat curang atas lahan seluas 9.190 hektar di koridor biogeografis Andes Chocó di Ekuador. Yayasan ALDEA telah mendukung perjuangan untuk keadilan ini dengan dukungan dari RRI.

Foto: ALDEA, 2023

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Tata Kelola Kehutanan Masyarakat di Nepal

Federasi Pengguna Hutan Masyarakat Nepal (FECOFUN) berhasil memperoleh persetujuan pemerintah untuk enam Rencana Operasional Hutan Masyarakat (CFOP) di Provinsi Gandaki, yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan pedoman Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Sebelumnya, banyak Kelompok Pengguna Hutan Masyarakat tidak dapat memperbarui rencana yang sudah usang, sehingga hutan tidak dikelola dengan baik dan partisipasi perempuan serta pemuda pun menjadi terbatas.



Gayanimaya Tamang, anggota Kelompok Pengguna Hutan Komunitas Lag Lage Pacha di dekat Kathmandu, memupuk tanah.
Foto: Asha Stuart
RRI, 2025

CFOP yang diperbarui mencakup luas 378,67 hektar, memperluas tutupan hutan, meningkatkan cadangan hutan, serta memperkenalkan inovasi mata pencaharian, termasuk ekowisata, budidaya hasil hutan bukan kayu, dan potensi perdagangan karbon.

Untuk menginstitutionalisasi kemajuan ini, FECOFUN menyelenggarakan dialog kebijakan di tingkat provinsi dan federal pada tahun 2025. Pihak berwenang provinsi berkomitmen untuk mengalokasikan dana pengembangan kehutanan guna pembaruan tambahan, sementara pihak berwenang federal berjanji untuk menyederhanakan format rencana operasional, memperkuat koordinasi antar jenjang pemerintahan, dan memastikan alokasi anggaran untuk pembaruan di seluruh negeri. Reformasi ini memperkuat tata kelola kehutanan masyarakat sekaligus memperluas partisipasi dan peluang mata pencaharian di provinsi tersebut.

Mendorong Perubahan Hukum dan Kebijakan

Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia

Pada tanggal 17 Desember 2025, sebuah kemenangan besar bagi hak-hak Masyarakat Adat diraih di Kabupaten Lombok Utara, Indonesia: Pengakuan resmi atas 12 wilayah adat di 5 kecamatan di kabupaten tersebut. Ditandatangani oleh Bupati Najmul Akhyar, keputusan tersebut mengakui adanya 51.158 hektar tanah adat dan secara resmi mendokumentasikannya dalam catatan pemerintah, serta menegaskan perlindungan negara terhadap hukum adat dan sistem tata kelola masyarakat. Didanai oleh Strategic Response Mechanism (SRM) atau Mekanisme Tanggapan Strategis RRI, pengakuan ini dilakukan setelah disetujuinya peta partisipatif baru yang dipimpin oleh AMAN Paer Daya dengan dukungan anggota masyarakat dan masyarakat sipil. Bagi masyarakat adat, keputusan ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi; bagi pembuat kebijakan, keputusan ini menetapkan landasan formal dan preseden untuk keputusan di masa depan terkait Masyarakat Adat di Indonesia.



Rumeneq, perwakilan perempuan adat dari komunitas Salut, memegang dokumen keputusan.
Foto: Kris Ayu RRI, 2025

Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

CLARIFI dalam Skala Besar

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, mekanisme pendanaan yang dipimpin oleh masyarakat adat dari RRI, CLARIFI, telah mendanai 186 proyek yang dipimpin oleh pihak lokal di 29 negara. Melalui kerja sama erat dengan anggota koalisi regionalnya dan Global Alliance of Territorial Communities (GATC), CLARIFI telah menggalang lebih dari \$40 juta dalam bentuk pendanaan langsung untuk MA, MKA, dan KL.



Dua petani sedang berbincang-bincang saat panen buah kakao di Kamerun.
Foto: Shutterstock

Pada tahun 2025, program ini mendukung 31 proyek dan 29 mitra di Amerika Latin, di mana 8 di antaranya dipimpin oleh perempuan. Mitra regional utama adalah Dana Wilayah Mesoamerika (FTM), yang memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada organisasi masyarakat adat dan yang dipimpin oleh perempuan. Melalui kemitraan dengan FTM ini, 16 proyek di enam negara menerima pendanaan CLARIFI, termasuk empat proyek yang dipimpin oleh organisasi perempuan. Bersama-sama, para mitra ini memperkuat perencanaan strategis, visi teritorial, dan sistem administrasi mereka agar menjadi lebih efektif.

Pada tahun 2025, CLARIFI menyelenggarakan dua forum pertukaran pengetahuan regional di Mesoamerika dan Andes Tropis yang diikuti oleh 85 peserta dari masyarakat adat dan komunitas yang dilindungi (MA dan MKA) dari 30 negara. Dengan menggunakan metodologi partisipatif, forum ini mendokumentasikan [pelajaran](#) penting yang dipetik dari proyek CLARIFI, mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif, serta merumuskan rekomendasi untuk keberlanjutan jangka panjang—yang menjembatani strategi organisasi dengan realitas konkret di lapangan.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya: 35 perempuan akan memiliki lahan seluas setidaknya 100 hektar. Ini benar-benar sebuah revolusi!”

Perempuan dari komunitas setempat

Mitra REFACOF, Kamerun

Contoh dampak CLARIFI melalui pemberian hibah pada tahun 2025:

- **Di wilayah Pasifik Kolombia**, ACADESAN telah membangun model perlindungan yang dipimpin oleh masyarakat, yang mengaitkan keamanan dengan martabat, hak asasi, dan kesejahteraan bersama melalui infrastruktur kemanusiaan serta penguatan tata kelola lokal. Para pemimpin menekankan bahwa memperjuangkan hak asasi manusia melalui model [perlindungan kolektif](#) tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan tanah dan budaya. Meskipun menghadapi kendala pendanaan dan kelembagaan, kemitraan seperti dukungan CLARIFI terhadap ACADESAN menunjukkan bagaimana perluasan upaya pertahanan kolektif dapat mengurangi kerentanan dan melindungi masyarakat.
- **Di Kamerun**, mitra RRI, REFACOF—sebuah jaringan regional yang bertujuan mempromosikan hak kepemilikan tanah dan hutan bagi perempuan—memperkuat proses dan struktur tata kelola organisasinya guna meningkatkan pengambilan keputusan dan efektivitas organisasi. Para anggota dari 16 negara bekerja sama untuk menyusun rencana strategis lima tahun dan memilih dewan regional yang baru. Di lapangan, [inisiatif transformatif gender](#) REFACOF, yaitu Protokol LILAGLÈ, telah membantu mengamankan 35 Sertifikat Kepemilikan Tanah Adat bagi perempuan di lima desa di Ngweï, dengan total luas lebih dari 100 hektar. Inisiatif ini juga menginspirasi 12 desa lainnya untuk meminta penerapan serupa di komunitas mereka.
- **Di Nepal**, CLARIFI mendukung [Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Adat \(CIPRED\)](#) untuk memajukan tata kelola mandiri masyarakat adat di dalam kawasan konservasi. Sebuah studi awal Sistem Pemantauan dan Informasi Berbasis Masyarakat yang mencakup 1.995 rumah tangga menghasilkan bukti kuantitatif pertama mengenai hak atas tanah dan mata pencaharian masyarakat adat di kawasan-kawasan tersebut. Lebih dari 200 pemimpin—perempuan, pemuda, dan pejabat—diberikan pelatihan mengenai konservasi berbasis hak dan hukum adat. Dua undang-undang tata kelola adat yang bersejarah disahkan atau diajukan di Manang dan Mustang, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat secara resmi mengakui lembaga-lembaga masyarakat adat. Proyek ini juga mendukung inisiatif mata pencaharian yang dipimpin perempuan dan memperoleh izin akses komunitas percontohan untuk produk hutan non-kayu, menandai pergeseran bersejarah dari konservasi benteng (*fortress conservation*) menuju kemitraan berbasis hak.

Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

Proyek di Pegunungan Andes Tropis

Di Bolivia, dukungan berkelanjutan CLARIFI kepada anggota koalisi RRI telah memperkuat hak teritorial dan memperkuat suara masyarakat adat. Kepemimpinan masyarakat adat selama bertahun-tahun berhasil mewujudkan penetapan 283.179 hektar wilayah adat Tacana II sebagai tanah komunitas asal (*Tierras Comunitarias de Origen, dalam bahasa Spanyol*). Kemenangan penting bagi pemegang hak masyarakat adat ini diraih di bawah kepemimpinan Fundación TIERRA

Para peserta lokakarya pelatihan tentang Sistem Peringatan Dini dan Tindakan di Bajo Quimiriki, Peru.
Foto: AIDSESP-Peru



Di Ekuador, Shuar Mutuall Center menjadi komunitas kedua yang memperoleh sertifikat tanah di dalam kawasan Hutan Lindung di negara tersebut, dengan luas lahan yang disertifikasi mencapai 3.580 hektar. Konfederasi Suku-Suku Asli Amazon Ekuador (CONFENIAE) memimpin proses ini, yang menandai kemenangan politik dan administratif yang signifikan bagi komunitas-komunitas tradisional yang berada di dalam kawasan lindung yang ditetapkan pemerintah. Proses ini menggunakan model kolaboratif inovatif yang menggabungkan keterlibatan berbasis komunitas dengan strategi teknis dan hukum untuk mengatasi hambatan birokrasi. Dukungan CLARIFI membantu komunitas tersebut menyerahkan berkas hukum kepada otoritas negara, termasuk peta planimetri terperinci, laporan batas wilayah, rencana pengelolaan, studi sosio-historis, dan data sensus untuk mendukung pengambilan keputusan.

Di Peru, komunitas-komunitas adat memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan yang dinamis untuk melindungi hak teritorial mereka dari ancaman eksternal. Organisasi adat nasional terkemuka, AIDSESP, mengembangkan sebuah platform digital bernama SAAT, yang dilengkapi dengan sistem pemantauan real-time dan peringatan dini bagi komunitas-komunitas tersebut. Terhubung ke server pusat yang menghubungkan komunitas-komunitas adat di Amazon Peru dengan para pembuat kebijakan di ibu kota, SAAT memungkinkan AIDSESP untuk segera mengaktifkan mekanisme perlindungan nasionalnya ketika ancaman muncul. AIDSESP juga memberikan pelatihan kepada komunitas, terutama kaum muda, dalam penggunaan alat-alat teknologi.

Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

Proyek di Cekungan Kongo

Di Republik Demokratik Kongo, Institut Sumber Daya Kongo (CRI) mendukung pembentukan pengelolaan hutan masyarakat seluas 15.807,53 hektar, dengan membantu masyarakat Kishiongo dan Kasambanza memetakan lahan mereka serta mengajukan permohonan izin konsesi masyarakat setelah proses pemetaan partisipatif. Proyek ini memperkuat kepemilikan lokal dan kolaborasi antara otoritas adat dan layanan pemerintah. Proyek ini melatih 240 anggota masyarakat lokal dalam bidang kehutanan masyarakat dan tata kelola, serta 100 perempuan dan pemuda tambahan dalam agroforestri dan teknik budidaya. Masyarakat menanam 18.000 bibit di tempat penyemaian, 5.000 tanaman asli, dan meningkatkan produktivitas pertanian untuk tanaman lokal seperti singkong, terong, kacang tunggak, tomat, dan okra.



Para petani perempuan berbagi pengalaman mereka dari proyek pertanian di Distrik Ngo, Republik Kongo.

Foto: Action Communautaires des Femmes Autochtones du Congo (ACFAC), 2024

Di Gabon, CLARIFI mendukung mitra lokal untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketahanan pangan komunitas adat dengan memperkuat kapasitas teknis mereka dalam produksi pertanian berkelanjutan. Proyek ini berfokus pada pendokumentasian pengetahuan tradisional dan penyesuaian praktik agroekologi dengan konteks lokal di desa Bitougat dan Doumassi. Diagnosis partisipatif terhadap situasi komunitas saat ini mengidentifikasi praktik pertanian yang ada, tantangan, dan kebutuhan prioritas mereka. Berdasarkan temuan ini, RRI melatih 31 anggota komunitas, termasuk 14 perempuan, mengenai teknik agroekologi, pertanian subsisten berkelanjutan, dan organisasi komunitas, dengan fokus pada penguatan koperasi dan asosiasi.

Di Republik Kongo, sebuah proyek untuk memperkuat pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan dari komunitas adat dan lokal di Distrik NGO, Departemen Plateaux telah dilaksanakan. Mitra lokal CLARIFI, ACFAC, mendirikan dua kelompok produsen pertanian yang dipimpin perempuan di Desa Djaka dan mengalokasikan dua hektar lahan untuk masing-masing kelompok. Mereka dilatih dalam budidaya singkong, kakao, cabai, dan jagung. Kelompok-kelompok tersebut menerima pelatihan mengenai agroekologi dan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, kekerasan berbasis gender, hak atas tanah, serta menabung dan kredit mikro. Proyek ini juga memberikan dana langsung kepada para perempuan untuk membeli alat-alat pertanian dasar guna pengembangan lahan dan penanaman.

Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

Pembiayaan Iklim yang Dipimpin oleh Perempuan

Pada [Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Aliran Sungai Hutan](#) di Brazzaville, CLARIFI memberikan dana sebesar \$240.000—masing-masing \$30.000—kepada delapan inisiatif akar rumput yang dipimpin oleh perempuan di seluruh Afrika.

Seorang peserta berbicara ke mikrofon pada Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Aliran Sungai Hutan di Brazzaville, Republik Kongo. Foto: REPALEAC dan RRI, 2025



Inisiatif-inisiatif ini mendorong regenerasi tanah, pemulihan keanekaragaman hayati, advokasi lahan dan hak atas tanah, serta mata pencaharian yang berkelanjutan. UNIPROBA memperluas akses lahan dan program pelatihan bagi perempuan Batwa di Burundi. Indigenous Peoples and Sustainable Development (IPSD) mendorong kewirausahaan dan pelestarian budaya di kalangan komunitas Mbororo di Kamerun. Action Communautaire des Femmes Autochtones (ACFAC) memperkuat dukungan agroekologi dan kredit mikro bagi perempuan hutan di Republik Kongo.

CLARIFI juga secara langsung mendanai empat organisasi WiGSA dan secara tidak langsung mendukung 7 organisasi lainnya melalui program-program regional dan mekanisme yang dipimpin masyarakat di Andes Tropis dan Cekungan Kongo. Program Keadilan Gender RRI dan CLARIFI berencana memperluas dukungan di masa mendatang kepada lebih banyak organisasi perempuan akar rumput, serta telah menyusun daftar proyek WiGSA untuk dipertimbangkan dalam siklus pendanaan mendatang, sehingga memungkinkan akses langsung yang lebih luas terhadap pendanaan bagi perempuan dari MA, MKA, dan KL.

Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan peran transformatif perempuan dalam mendorong pembangunan yang berlandaskan hak asasi manusia dan tangguh terhadap perubahan iklim di seluruh komunitas mereka.

Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

Memengaruhi Janji dan Komitmen Pendanaan Global

Sama halnya dengan reformasi hukum, perubahan pada ekosistem pendanaan global tidak terjadi dalam semalam. Perubahan tersebut didukung oleh upaya advokasi jangka panjang dan berkelanjutan yang sering kali berlangsung di sela-sela platform-platform besar, jauh sebelum perubahan tersebut mulai terlihat.



Para pemuda berpose untuk difoto setelah acara sampingan yang dipimpin oleh pemuda dan berlangsung sukses di COP30 UNFCCC di Belém, Brasil.
Foto: RRI, 2025

RRI dan organisasi mitranya memainkan peran advokasi yang sangat penting dalam merumuskan Komitmen Pengelolaan Hutan dan Tanah senilai **\$1,8 miliar** serta Komitmen Antar-Pemerintah tentang Pengelolaan Tanah (ILTC) yang bersejarah, yang diumumkan pada KTT Pemimpin Dunia COP30 pada November 2025, di mana 15 negara dan sejumlah lembaga filantropi berjanji untuk menjamin hak pengelolaan atas **160 juta hektar** lahan yang dimiliki oleh MA, MKA, dan KL pada tahun 2030, disertai dengan peningkatan pembiayaan publik.

Pelajari bagaimana RRI berkontribusi terhadap kemenangan bersejarah ini pada tahun 2025:

●	April	April – Kegiatan advokasi dan diskusi resmi dengan Presidensi COP30 dan FCLP dalam Forum Permanen PBB tentang Masalah Masyarakat Adat
●	Mei	Deklarasi Brazzaville dari Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Daerah Aliran Sungai Hutan
●	Juli	Kegiatan dalam Pekan Aksi Iklim London
●	Agustus	RRI dan WiGSA meluncurkan analisis pertama mengenai pendanaan global yang menjangkau perempuan dari masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal
●	September	Dashboard Path to Scale diterbitkan
●	September	Pekan Iklim New York
●	November	COP30 UNFCCC

Kontribusi sepanjang tahun adalah:

- Koordinasi jaringan donor dan perantara Path to Scale
- Kampanye “The Pledge We Want” bersama Tenure Facility dan If Not Us Then Who?
- Membagikan dampak pendanaan langsung CLARIFI kepada masyarakat di Andes Tropis dan Cekungan Kongo



Memperluas Akses Pembiayaan Langsung dan Fleksibel bagi Masyarakat

Membangun Momentum Melalui Advokasi dan Analisis

Pada bulan Mei 2025, RRI bergabung dengan REPALEAC dan GATC untuk bersama-sama menyelenggarakan Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Aliran Sungai Hutan, yang dihadiri oleh 156 perwakilan dari Afrika, Asia, Mesoamerika, dan Amerika Selatan di Brazzaville. Para peserta menerbitkan [Deklarasi Brazzaville](#) dan menggunakan dokumen tersebut untuk memperjuangkan hak-hak mereka menjelang COP30, yang berkontribusi pada mobilisasi dana donor yang signifikan yang dijanjikan oleh Forest Tenure Funders Group dan donor global lainnya. Yang juga tidak kalah pentingnya, selama KTT Pemimpin menjelang COP30 pada November 2025, Presiden Republik Kongo mengutip Deklarasi tersebut dalam pidatonya dan mendesak para kepala negara lain untuk mengakui hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya mereka.

Bekerja sama dengan Global Land Alliance, RRI terus mengoordinasikan sejumlah komitmen nasional terkait ILTC dalam kerangka Kemitraan Pemimpin Hutan dan Iklim. Melalui dialog berkelanjutan dengan para donor dan pemangku kepentingan utama lainnya, kampanye [The Pledge We Want](#), serta analisis strategis, upaya RRI berhasil memperluas cakupan komitmen tersebut ke ekosistem dan donor baru, serta memastikan bahwa isi komitmen tersebut berfokus pada pendanaan langsung bagi pemegang hak.

[Dasbor Pendanaan Path to Scale](#) dari RRI dan pembaruan [Laporan Kondisi Pendanaan](#) memantau aliran dana donor global ke MA, MKA, dan KL, dengan memperluas cakupannya melampaui hutan ke ekosistem lain. Penelitian yang dilakukan oleh RRI dan WIGSA juga memantau [pendanaan yang diterima oleh perempuan dari MA, MKA, dan KL](#) secara khusus, yang semakin memengaruhi komitmen donor untuk secara lebih konkret menangani isu gender dalam komitmen pendanaan mereka. Diluncurkan menjelang COP30, instrumen analisis ini memperkuat advokasi dan akan terus menjadi panduan akuntabilitas menuju tujuan iklim dan keanekaragaman hayati tahun 2030.


“Kerja sama lintas benua, tradisi, dan generasi dalam kongres ini merupakan pengingat yang kuat bahwa kekuatan terletak pada tindakan bersama. Kami siap untuk terus memanfaatkan kedalaman pengetahuan kami dan semangat kerja sama kami guna menempuh jalan bersama menuju masa depan yang adil, layak huni, dan setara.”

Deklarasi Brazzaville

Bukti, Akuntabilitas, dan Kepemimpinan Pemikiran

Pelacakan Hak Tanah dan Data Gender

Laporan analisis gender unggulan RRI, berjudul *Resilience and Resistance*, menyajikan penilaian terkini mengenai hak-hak perempuan yang diakui secara hukum atas hutan masyarakat di 35 negara per tahun 2024. Laporan tersebut mengkaji reformasi hukum sejak tahun 2016 dan memberikan bukti konkret bagi para pemimpin perempuan dari MA, MKA, dan KL untuk menentang undang-undang yang diskriminatif serta memperjuangkan perlindungan yang lebih kuat.



Sara Omi, seorang anggota komunitas adat Ipeti Embera di Panama, sedang menanam bibit pohon.
Foto: Asha Stuart RRI, 2025

Diluncurkan pada sidang ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69), analisis tersebut mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memajukan agenda hak perempuan secara global. Di CSW69 pula, para anggota WiGSA dan para pemimpin perempuan adat dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin turut serta dalam diskusi yang mengaitkan bukti hukum dengan pengalaman nyata, guna memperkuat kapasitas masyarakat akar rumput dalam memengaruhi reformasi kebijakan.

Data dari *Resilience and Resistance* juga digunakan untuk mendukung pembelajaran lintas wilayah antar rekan sejawat, termasuk pertukaran antara para pemimpin perempuan dari Peru dan Nepal untuk membandingkan kerangka hukum nasional serta membangun solidaritas lintas negara.

Bukti, Akuntabilitas, dan Kepemimpinan Pemikiran

Bukti tentang Konservasi yang Dipimpin oleh Masyarakat

Pada tahun 2025, RRI menerbitkan sebuah studi tentang *Jalur Pendukung untuk Konservasi Berbasis Hak yang Dipimpin oleh Masyarakat*, yang menilai kerangka hukum dan strategi keanekaragaman hayati di 30 negara. Dikembangkan bersama ICCA Consortium dan Forest Peoples Programme, analisis tersebut menemukan bahwa meskipun jalur hukum untuk konservasi masyarakat yang diakui sudah ada, jalur tersebut masih kurang dimanfaatkan dan belum memadai.

Dipresentasikan pada Kongres Konservasi Dunia IUCN, temuan tersebut memperluas perdebatan mengenai hambatan struktural dalam mencapai pendekatan berbasis hak terhadap target 30×30, sekaligus memperkuat argumen bagi tata kelola berbasis masyarakat dalam strategi keanekaragaman hayati global. Ke depan, RRI akan menggunakan temuan tersebut untuk mendukung Forum Internasional Masyarakat Adat tentang Keanekaragaman Hayati milik IUCN.




Anggota masyarakat Talang Mamak di Provinsi Riau mengumpulkan hasil hutan, Indonesia.
Foto: Jacob Maentz
RRI, 2022

Bukti, Akuntabilitas, dan Kepemimpinan Pemikiran

Komitmen terhadap Pembelajaran, Adaptasi, dan Akuntabilitas

Pada tahun 2025, RRI menandai ulang tahunnya yang ke-20 dengan merefleksikan dampak koalisi serta pembelajaran yang dipetik selama dua dekade. Setelah mempertemukan para anggota pendiri dan mitra saat ini di Nepal dalam perayaan ini, RRI menerbitkan [laporan capaian penting](#) dan memproduksi sebuah [film dokumenter](#) yang menelusuri perjalanan koalisi dari target awal hingga pencapaian-pencapaian yang menjadi preseden.



Hutan Komunitas Shree Bindeshwari, Nepal. Hutan Komunitas ini seluas 54 hektar dan dikelola oleh 254 rumah tangga. Sebagian besar pengelola hutan ini adalah perempuan dari masyarakat adat dan lokal, yang telah mengelola hutan tersebut selama lebih dari 30 tahun.
Foto: Asha Stuart
RRI, 2025

Proses tersebut mencakup lebih dari 100 wawancara dengan para pendiri, pemimpin koalisi, perempuan, pemuda, serta para pemimpin MA, MKA, dan KL di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Laporan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Spanyol, Portugis, Bahasa Indonesia, dan Nepali, sementara film dokumenter—yang diluncurkan pada bulan Oktober—sedang diberi subtitle dalam berbagai bahasa koalisi.

Sepanjang tahun 2025, RRI juga menerbitkan, menerjemahkan, dan menyebarkan 12 analisis tambahan serta ringkasan kebijakan dalam enam bahasa, yang dilengkapi dengan materi grafis siap pakai untuk advokasi bagi anggota koalisi. Selain itu, RRI meluncurkan situs web baru yang dinamis untuk [Land Rights Standard](#), yang menyediakan sumber daya yang mudah diakses guna membantu entitas publik dan swasta memahami serta menerapkan prinsip-prinsip berbasis pemegang hak dalam pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MA, MKA, dan KL dalam proyek iklim, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan mereka.

Secara keseluruhan, analisis dan produk RRI ini memperkuat transparansi, pembelajaran, serta advokasi berbasis bukti di seluruh jaringan global kami.

Publikasi Terpilih



Berakar Kuat dan Berkembang: 20 Tahun Dampak Kolektif dan Jalan ke Depan

Sebuah gambaran dua dekade kerja RRI di berbagai benua, budaya, dan gerakan, dengan tujuan membangun planet yang lebih adil dan berkelanjutan.

Unduh publikasi >



Laporan Tahunan tentang Pendanaan untuk Hak Atas Tanah

Pembaruan tahunan mengenai situasi pendanaan dari donor yang ditujukan untuk Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika di negara-negara tropis, termasuk cakupan pendanaan yang diperluas untuk ekosistem di luar hutan.

Unduh publikasi >



Jalan Menuju Kesuksesan

Menganalisis kerangka hukum dan strategi keanekaragaman hayati dari 30 negara untuk mengevaluasi kemajuan menuju konservasi berbasis hak dan dipimpin oleh komunitas.

Unduh publikasi >



Apakah Pendanaan Global Menjangkau Perempuan Pribumi, Keturunan Afrika, dan Lokal?

Sebuah analisis yang menyoroti kurangnya pendanaan bagi perempuan Pribumi, Keturunan Afrika, dan komunitas lokal, serta kebutuhan untuk memasukkan perspektif yang peka terhadap isu gender dalam komitmen pendanaan.

Unduh publikasi >



Melindungi Komunitas untuk Menyelamatkan Planet

Praktik terbaik dari komunitas yang mempertahankan wilayah dan budayanya, mulai dari Cagar Biosfer Maya di Guatemala dan Pulau Enggano di Indonesia, hingga wilayah Bastar di India, Hutan Amazon Ekuador, dan Kolombia.

Unduh publikasi >



Ketahanan dan Perlawanan

Penilaian terbaru mengenai situasi hak kepemilikan hutan bagi perempuan Indigenous, keturunan Afrika, dan komunitas lokal di 35 negara kunci di Global Selatan.

Unduh publikasi >

Pembelajaran dari Kegiatan Kami

Upaya kolektif kami sepanjang tahun 2025 memperkuat sejumlah pembelajaran kunci yang terus kami refleksikan dan integrasikan ke dalam program kami.

Peningkatan pembiayaan langsung

Peningkatan pembiayaan langsung kepada organisasi MA, MKA, dan KL memerlukan penyederhanaan persyaratan kelayakan hibah serta prosedur pengelolaan yang lebih ringkas dan fleksibel, guna mengurangi beban administratif bagi penerima sekaligus menjangkau organisasi yang lebih kecil dan kurang berpengalaman. Dengan mengintegrasikan penguatan kapasitas ke dalam dukungan pengelolaan hibah, kami mendampingi organisasi penerima sesuai dengan titik awal mereka, serta mendukung perjalanan menuju peningkatan keberlanjutan, visibilitas, dan diversifikasi sumber pendanaan. Selain hibah langsung, penguatan kapasitas dana teritorial untuk penyaluran hibah, sebagai sarana meningkatkan kepemilikan dan memperkuat dukungan finansial terhadap agenda teritorial, merupakan komponen kunci dalam mewujudkan pembiayaan yang lebih efektif dan mudah diakses bagi MA, MKA, dan KL.

Penggabungan hak

Hak asasi manusia bersifat tidak terpisahkan; oleh karena itu, promosi dan pembelaannya harus dilakukan secara holistik dan multidimensi. Upaya memajukan hak tenurial kolektif perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan MA, MKA, dan KL melalui penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta tata kelola yang inklusif dan kokoh, dengan memastikan partisipasi setara perempuan, laki-laki, dan pemuda. Ke depan, dukungan RRI akan semakin mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu terhadap kesejahteraan menyeluruh MA, MKA, dan KL.

Memajukan aksi kolektif

Advokasi bersama dan aksi kolektif memerlukan dukungan yang berkelanjutan dan konsisten untuk memungkinkan koalisi dan jaringan MA, MKA, dan KL saling bertukar, berkoordinasi, serta berkumpul, baik di dalam maupun di luar kerangka forum nasional, regional, dan global yang sudah ada. Memperkuat koalisi MA, MKA, dan KL, terutama yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, membutuhkan pendampingan yang terfokus dan berkelanjutan. Hal ini mencakup fasilitasi pertemuan serta dukungan penguatan teknis dan kelembagaan, guna mendorong peningkatan visibilitas dan pengaruh mereka yang terus berkembang.

Perlindungan pembela hak atas tanah

Membela hak atas tanah seringkali menempatkan para aktivis di garis depan konflik. Perlindungan kolektif bagi para pembela hak atas tanah semakin perlu dipandang sebagai komponen utama dalam tata kelola lahan yang efektif. Keselamatan pembela hak atas tanah, khususnya perempuan dan pemuda, berada pada risiko yang lebih tinggi mengingat kerentanan sosial mereka yang berlapis. RRI telah meningkatkan dukungannya terhadap jaringan kewaspadaan komunitas, aliansi dengan organisasi perlindungan, pembelaan hukum bagi para pembela, serta advokasi untuk peningkatan perlindungan di tingkat lokal seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap kelompok-kelompok ini.

Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pengelolaan

Anggota Dewan	Membuat keputusan strategis bagi koalisi terkait tata kelola, keuangan, administrasi, perluasan atau peninjauan program, mekanisme pendanaan, aspek hukum, serta manajemen risiko.
Dewan Penasihat	Mengawasi pengelolaan koalisi, menyetujui mitra baru, serta memberikan suara dalam penunjukan perwakilan mitra ke Dewan. Memberikan nasihat mengenai isu-isu ad hoc seperti permintaan dukungan (sign-on), manajemen krisis, dan arahan programatik.
Mitra	Organisasi yang terlibat dalam program-program RRI, seperti menjadi penulis bersama analisis strategis; menjadi tuan rumah bersama lokakarya, webinar, dan acara; serta berpartisipasi dalam mekanisme pendanaan, proses perencanaan strategis, dan berbagai kegiatan RRI lainnya.
Rekan Ahli	Memberikan dukungan keahlian kepada koalisi RRI sesuai bidang kepakaran masing-masing. Berbagi pemikiran kepemimpinan (thought leadership) dan arahan kepada koalisi melalui lokakarya, webinar, artikel, dan laporan.
Dewan Tetua	Memberikan nasihat ad hoc kepada Koordinator dan Presiden RRI serta jajaran kepemimpinan RRI. Mereka merupakan tokoh-tokoh terkemuka di sektor hak atas tanah dan lingkungan, termasuk para pendiri, pemimpin senior/tetua dari komunitas Masyarakat Adat, keturunan Afrika, dan komunitas lokal, mantan Ketua Dewan, serta individu-individu yang memiliki berpengaruh.
Sekretariat	Staf RRI yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program.

Pada tahun 2025, koalisi RRI meninjau kembali Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang menetapkan peran dan tanggung jawab berbagai badan dalam koalisi. Pembaruan MoU dilakukan setiap lima tahun dan menjadi kesempatan untuk merefleksikan komposisi koalisi. Untuk siklus ini, melalui konsultasi yang luas dengan para mitra RRI, Dewan Direksi, fellows, anggota koalisi, dan Sekretariat, disepakati untuk secara signifikan memperluas koalisi dari **20 menjadi lebih dari 80 mitra**. Koalisi juga menyepakati pembentukan Dewan Penasihat (Advisory Council) dan Dewan Tetua (Council of Elders) untuk mengelola dan mengarahkan pertumbuhan koalisi.

Sekretariat, yang dipimpin oleh Presiden dan Koordinator RRI, berfungsi sebagai mekanisme koordinasi koalisi dan didukung oleh tenaga profesional senior dan junior, pakar tingkat negara dan regional, serta pemimpin lapangan. Sekretariat membangun basis bukti untuk mendorong pengakuan hak, melakukan penelitian dan advokasi, serta mempromosikan temuan di tingkat global. Selain itu, Sekretariat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi, dan mendukung reformasi tenurial melalui keterlibatan di tingkat negara. Sekretariat juga menginkubasi inisiatif yang mengisi kesenjangan dalam upaya hak atas tanah berbasis komunitas serta menyediakan pendanaan respons cepat melalui SRM. Di samping itu, Sekretariat memimpin pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran, menjaga hubungan dengan donor, mendiversifikasi sumber pendapatan, serta beroperasi di bawah pengawasan Dewan Direksi RRI.

RRI dikenal karena menginkubasi dan mendukung aliansi serta inisiatif untuk mengangkat suara perempuan dan pemuda serta melibatkan pemangku kepentingan tertentu dalam memajukan hak atas tanah dan tenurial. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi: Women in Global South Alliance (*WiGSA*), jaringan pemimpin lembaga kehutanan publik yang disebut *MegaFlorestais*, *Interlaken Group* yang terdiri dari pelaku sektor swasta, *Path to Scale* yang bertujuan mendorong akuntabilitas donor terhadap komitmen pendanaan global, serta Global Youth Network yang mendorong *peta jalan* yang dikembangkan dalam Kongres Pemuda Global yang diselenggarakan oleh RRI pada tahun 2025.

Selain program regional dan tematik, RRI telah membentuk mekanisme pendanaan langsung untuk mendukung komunitas dan organisasi MA, MKA, dan KL. Community Land Rights and Conservation Finance Initiative (*CLARIEI*) atau Inisiatif Hak Lahan Masyarakat dan Keuangan merupakan mekanisme pembiayaan langsung yang mendukung prioritas yang ditentukan sendiri oleh komunitas pemegang hak dengan berperan sebagai jembatan terpercaya antara komunitas dan pemberi dana. *Strategic Response Mechanism (SRM)* dirancang secara khusus untuk memberikan respons yang tepat waktu dan fleksibel terhadap peluang serta ancaman yang muncul dan mendesak. Mekanisme ini melengkapi proses perencanaan program tahunan dengan memungkinkan pendanaan cepat untuk peluang yang tidak terduga.

Keuangan Tahun 2025



\$11.041.223

dana telah didapatkan

\$3.846.838

dana belum didapatkan



\$15.213.343

dana telah didapatkan

\$9.363.655

dana belum didapatkan

81

proyek

20

negara



\$605.553

dana telah didapatkan

14

proyek

10

negara

*Semua total dalam USD.



Seorang perempuan membungkuk di atas api di luar sebuah tempat berteduh, Honduras.

Foto: If Not Us Then Who?

2025
Laporan
Tahunan



**RIGHTS +
RESOURCES**